



Integrasi Nilai Pendidikan Islam dalam Struktur Kurikulum Merdeka: Kajian Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Muhammad Atho'illah^{1*}, Kasuwi Saiban², Ahmad Manshur³

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, ²Universitas Merdeka Malang, ³Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

atho.muhamnad00@gmail.com¹, kasuwi.saiban@gmail.com²,
manshur@unugiri.ac.id³

Article Info

Article history:

Received April 25, 2025

Revised April 30, 2025

Accepted May 17, 2025

Keywords:

Independent Curriculum,
Islamic Education, Alqur'an,
Hadith, Value Integration

ABSTRACT

Education in Muslim-majority Indonesia expects a curriculum system that integrates Islamic values thoroughly. This article examines the structure of the Merdeka Curriculum implemented since 2024 and assesses its relevance to Islamic education principles based on the Qur'an and Hadith. The research method uses a literature study with content analysis on curriculum documents, Islamic education literature, and primary sources of the Qur'an and Hadith. The results of the study show that the structure of the Merdeka Curriculum still separates Islamic Religious Education from general subjects, so moral and spiritual values have not been thoroughly standardized in graduate competencies. However, there are opportunities for integration of Islamic values through a flexible Education Unit Operational Curriculum (KOSP). This article recommends policy reformulation and teacher training so that Islamic values become the main foundation of national education, so that it can form a generation with knowledge and noble character.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2025

Revised April 30, 2025

Accepted May 17, 2025

Keywords:

Kurikulum Merdeka,
Pendidikan Islam, Alqur'an,
Hadits, Integrasi Nilai

ABSTRACT

Pendidikan di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim mengharapkan sistem kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Artikel ini mengkaji struktur Kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak 2024 dan menilai relevansinya dengan prinsip pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan analisis konten pada dokumen kurikulum, literatur pendidikan Islam, dan sumber primer Al-Qur'an dan Hadits. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur Kurikulum Merdeka masih memisahkan Pendidikan Agama Islam dari mata pelajaran umum, sehingga nilai-nilai akhlak dan spiritual belum terstandarisasi secara menyeluruh dalam kompetensi lulusan. Namun, terdapat peluang integrasi nilai Islam melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang fleksibel. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan pelatihan guru agar nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama pendidikan nasional, sehingga dapat membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Atho'illah
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: atho.muhamnad00@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam sistem pendidikannya. Namun, struktur kurikulum pendidikan nasional, khususnya Kurikulum Merdeka yang diberlakukan sejak 2024, masih menunjukkan pemisahan yang jelas antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum, sehingga nilai-nilai Islam belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses pembelajaran (Kemendikbudristek 2022).

Kurikulum Merdeka memiliki struktur utama yang terdiri atas capaian pembelajaran (CP), pembelajaran intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar, dengan menitikberatkan pada pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi (Nazar et al. 2024). Namun, meskipun pendidikan agama Islam (PAI) menjadi salah satu mata pelajaran wajib, integrasi nilai-nilai agama ke dalam seluruh aspek kurikulum masih sangat terbatas dan belum menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum bukan sekadar penyampaian materi pelajaran, tetapi merupakan proses holistik yang menggabungkan aspek keimanan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an menekankan pentingnya proses belajar yang dimulai dengan kesadaran akan Allah SWT sebagai sumber ilmu (QS. Al-'Alaq: 1-5), serta pendidikan moral dan sosial yang menjadi pondasi dalam membentuk kepribadian mulia (QS. Luqman: 13-19). Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa ilmu tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi harus diamalkan dan membentuk akhlak yang mulia (Darani 2021).

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius mengingat adanya berbagai fenomena sosial negatif di kalangan pelajar, seperti perundungan, penyalahgunaan teknologi, dan pelecehan, yang menunjukkan lemahnya pembentukan karakter dalam pendidikan saat ini (Wulandari and Ningsih 2023). QS. At-Tahrim (6) secara eksplisit memerintahkan orang tua dan pendidik untuk melindungi anak-anak dari perilaku buruk melalui pendidikan yang berbasis takwa, yang saat ini belum menjadi standar dalam kurikulum nasional.

Lebih lanjut, Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan pengembangan kurikulum dan penilaian, belum secara eksplisit menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar normatif. Hal ini tercermin dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yang hanya menyebutkan unsur "iman dan takwa" secara umum



dalam standar kompetensi lulusan tanpa integrasi nilai keislaman yang konkret (Atma 2019). Padahal, konsep pendidikan Islam mengajarkan bahwa seluruh ilmu adalah ibadah jika diarahkan kepada Allah SWT (Puspitasari and Yuliana 2022)

Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional, belum terdapat kebijakan nasional yang mendorong integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits sebagai fondasi utama dalam penyusunannya. Akibatnya, pendidikan Islam masih terbatas dalam lingkup madrasah dan pesantren, sehingga belum menyentuh seluruh sistem pendidikan nasional (Muh. Subhan Ashari 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan penting: Sejauh mana struktur Kurikulum Merdeka relevan dan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim? Pertanyaan ini menjadi fokus kajian untuk membuka diskusi yang mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (studi pustaka). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dokumen kurikulum nasional, maupun literatur klasik Islam seperti tafsir Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai struktur kurikulum nasional Indonesia, khususnya Kurikulum Merdeka, serta mengkaji relevansinya dengan

prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari tiga sumber utama. Pertama, dokumen resmi "*Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*", yang menjadi landasan struktural dalam memahami kerangka dan prinsip kurikulum nasional saat ini. Kedua, artikel ilmiah berjudul "*Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Nasional*", yang membahas secara konseptual bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Ketiga, sumber primer dari Al-Qur'an dan Hadits, khususnya ayat-ayat seperti QS. Al-'Alaq (1–5) dan QS. Luqman (13–19), serta hadits-hadits tentang keutamaan ilmu dan akhlak dalam pendidikan (HR. Muslim), yang dijadikan dasar normatif untuk menganalisis relevansi struktur kurikulum nasional terhadap prinsip-prinsip pendidikan Islam. Ketiga sumber ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi keselarasan dan ketimpangan antara kurikulum modern dan nilai-nilai wahyu.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemisahan Nilai Agama dalam Struktur Kurikulum

Kurikulum Merdeka, yang saat ini diterapkan di Indonesia, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam implementasinya, terdapat pemisahan yang jelas antara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh aspek pembelajaran.



Dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral. QS. Al-‘Alaq ayat 1–5 menekankan pentingnya membaca dan belajar dengan menyebut nama Tuhan, yang menciptakan manusia dan mengajarkan dengan pena. Ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan harus dimulai dengan kesadaran akan keberadaan Allah sebagai sumber ilmu (Sulaiman and Musthofa 2023).

Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beradab, yaitu individu yang mengenal dan mengakui tempat segala sesuatu dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Menurut al-Attas, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum modern merupakan warisan kolonialisme intelektual Barat yang tidak sesuai dengan konsep pendidikan Islam.

Pemisahan antara PAI dan mata pelajaran umum dalam Kurikulum Merdeka dapat menyebabkan peserta didik mengalami disorientasi nilai. Mereka mungkin unggul dalam aspek kognitif, tetapi lemah dalam aspek spiritual dan moral. Hal ini dapat berdampak pada perilaku peserta didik di kehidupan sehari-hari, seperti meningkatnya kasus perundungan dan penyalahgunaan teknologi di kalangan pelajar.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran dapat membantu membentuk karakter peserta didik yang utuh. Misalnya, dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), guru dapat mengaitkan materi dengan nilai-nilai keislaman, seperti tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (Ramadhan and Santosa 2023).

Namun, integrasi ini memerlukan pemahaman dan keterampilan khusus dari

para guru. Sayangnya, banyak guru mata pelajaran umum yang belum memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru agar mampu melaksanakan integrasi tersebut secara efektif.

Selain itu, struktur kurikulum yang ada saat ini belum mendukung integrasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Kurikulum masih memisahkan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, sehingga nilai-nilai spiritual tidak menjadi bagian integral dari seluruh proses pembelajaran.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan reformulasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum berbasis integrasi, di mana setiap mata pelajaran dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara seimbang, dengan landasan nilai-nilai Islam.

Implementasi kurikulum berbasis integrasi ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional, sementara lembaga pendidikan perlu menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi para guru (Hadi 2024).

Masyarakat, terutama orang tua, juga memiliki peran penting dalam mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Mereka dapat membantu memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah melalui pembinaan di rumah dan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam struktur kurikulum merupakan



langkah penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam aspek jasmani dan rohani.

2. Ketiadaan Standarisasi Akhlak dalam Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan merupakan indikator utama dalam keberhasilan sistem pendidikan. Dalam Kurikulum Merdeka, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dirumuskan dalam bentuk karakter Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup dimensi seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong (Kemendikbudristek 2022). Namun, rumusan tersebut masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek implementatif dalam kurikulum lintas mata pelajaran.

Dalam implementasinya, dimensi "beriman dan bertakwa" tidak dikembangkan secara sistemik melalui mata pelajaran selain Pendidikan Agama. Akibatnya, pembentukan akhlak mulia dan nilai spiritual peserta didik belum terstandar dengan jelas. Padahal, menurut perspektif Islam, akhlak adalah inti dari tujuan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"* (HR. Ahmad). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi lebih kepada keberhasilan pembentukan karakter.

Akhlak dalam Islam bukan sekadar moral umum, tetapi merupakan standar nilai yang bersumber dari wahyu, yang menyatu dengan iman dan ibadah. Dalam QS. Luqman: 13–19, Allah menggambarkan proses pendidikan

Luqman kepada anaknya yang mencakup aspek tauhid, akhlak pribadi, ibadah ritual, dan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menstandarkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pendidikan

Sayangnya, dalam Kurikulum Merdeka, tidak terdapat indikator evaluasi yang secara eksplisit mengukur perkembangan akhlak peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Evaluasi pembelajaran lebih berfokus pada asesmen formatif dan sumatif berbasis kompetensi kognitif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal yang tercantum dalam SKL dan realitas implementasi di kelas (Nazar et al. 2024).

Penelitian oleh (Ramadhan and Santosa 2023) menunjukkan bahwa guru-guru di sekolah dasar kesulitan menerapkan penguatan karakter secara konkret karena tidak adanya indikator penilaian akhlak yang terintegrasi dalam struktur kurikulum dan asesmen. Mereka cenderung fokus pada target capaian pembelajaran kognitif, sementara pembentukan karakter diserahkan sepenuhnya pada guru agama.

Ketiadaan standarisasi akhlak juga menyebabkan ketimpangan dalam pembinaan peserta didik. Peserta didik yang menonjol dalam kemampuan akademik seringkali tetap lulus dan dianggap berhasil, meskipun menunjukkan perilaku menyimpang atau tidak memiliki keteladanan sosial. Padahal, dalam paradigma Islam, kecerdasan tanpa akhlak adalah cacat karakter (Al-Attas 1991).

Ketika akhlak tidak menjadi tolok ukur kelulusan atau keberhasilan pendidikan, maka akan muncul generasi yang cerdas secara teknologi namun kehilangan arah moral. Fenomena ini tampak dari banyaknya kasus penyalahgunaan media sosial, tindakan tidak etis di lingkungan sekolah, hingga



merosotnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua (Wulandari and Ningsih 2023)

Pendidikan Islam tidak membedakan antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter. Keduanya harus berjalan selaras. Oleh karena itu, standarisasi akhlak perlu masuk ke dalam struktur kurikulum nasional sebagai bagian dari indikator keberhasilan pendidikan, bukan hanya sebagai pelengkap dalam narasi SKL. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah merumuskan indikator akhlak lintas mata pelajaran, yang dapat dimasukkan dalam asesmen pembelajaran harian. Misalnya, nilai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas bisa dinilai dalam pelajaran Matematika, nilai kejujuran dalam pelajaran Bahasa, dan nilai kepedulian dalam pelajaran IPS.

Guru pun harus dibekali dengan pelatihan untuk memahami bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam materi ajarnya. Dalam penelitian oleh (Mardatillah, Wardah, and Gusmaneli 2025), disebutkan bahwa guru cenderung merasa ragu menanamkan nilai spiritual karena khawatir keluar dari materi pokok. Padahal, pendidikan Islam justru menghendaki setiap guru menjadi *murabbi* yakni pendidik ruhani dan akhlak.

Upaya standarisasi akhlak harus pula didukung oleh sistem penilaian yang menyeluruh, termasuk laporan perkembangan karakter siswa yang disampaikan kepada orang tua secara berkala. Sekolah berbasis Islam telah lama menggunakan metode ini dalam buku raport akhlak dan tahfidz, dan ini bisa diadopsi oleh sekolah umum dengan modifikasi konteks.

Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu menyusun standar evaluasi akhlak yang dapat diberlakukan secara nasional, tanpa menghilangkan keberagaman pendekatan. Langkah ini akan membantu merealisasikan

Profil Pelajar Pancasila secara menyeluruh, tidak hanya pada slogan tetapi pada praktik nyata di kelas dan kehidupan sosial peserta didik.

Model ini juga bisa memperkaya Kurikulum Merdeka yang mengusung pendekatan proyek (P5). Proyek karakter yang melibatkan kegiatan sosial keagamaan, pengabdian masyarakat, atau proyek kebaikan lingkungan bisa dijadikan alat ukur perkembangan akhlak dan spiritualitas peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan memasukkan akhlak ke dalam indikator keberhasilan pembelajaran secara eksplisit, pendidikan Indonesia tidak hanya akan mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan integritas moral. Pendidikan yang terstandarisasi secara spiritual adalah kunci dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat

3. Peluang Integrasi Melalui Kurikulum Operasional Sekolah

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik serta lingkungan sekolah. Fleksibilitas ini membuka peluang besar bagi sekolah, terutama yang berbasis Islam, untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek pembelajaran. Dalam panduan pengembangan KOSP, disebutkan bahwa kurikulum operasional harus kontekstual dan mencerminkan kekhasan serta kebutuhan satuan pendidikan (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan and Kemenristek 2022)

Integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti memasukkan nilai-nilai



keislaman dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, serta mengaitkan materi pelajaran dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru dapat mengaitkan konsep penciptaan alam semesta dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ciptaan Allah, sehingga peserta didik dapat memahami ilmu pengetahuan dalam konteks keimanan.

Selain itu, pendekatan tematik integratif juga dapat diterapkan, di mana tema-tema pembelajaran dirancang untuk mencakup berbagai mata pelajaran dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, tema "Kebersihan" dapat mencakup pelajaran IPA tentang kebersihan lingkungan, PAI tentang pentingnya kebersihan dalam Islam, dan Bahasa Indonesia melalui penulisan teks tentang menjaga kebersihan. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam secara holistik.

Kurikulum Merdeka juga mendorong pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik melalui kegiatan yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, seperti kegiatan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan pengembangan kreativitas. Dengan demikian, peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai keislaman melalui pengalaman langsung (Sufiyah and Cahyadi 2024)

Implementasi integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP memerlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kepala sekolah perlu memfasilitasi pengembangan kurikulum yang integratif, sementara guru harus

memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Komite sekolah dan orang tua juga perlu dilibatkan untuk mendukung dan memperkuat implementasi kurikulum tersebut.

Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangat penting dalam mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP. Guru perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang integratif, serta memahami cara mengaitkan materi pelajaran dengan ajaran Islam secara tepat dan relevan. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi keagamaan.

Evaluasi dan asesmen dalam Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang untuk menilai aspek spiritual dan moral peserta didik. Guru dapat mengembangkan instrumen evaluasi yang menilai pemahaman dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP juga dapat memperkuat identitas dan karakter peserta didik sebagai Muslim yang berakhlak mulia. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, peserta didik dapat menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan landasan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Pengembangan KOSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,



bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum operasional sekolah dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan and Kemenristek 2022).

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan budaya, nilai, dan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk integrasi nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah (Hadi 2024).

Implementasi integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman, peserta didik dapat memahami materi pelajaran secara lebih mendalam dan bermakna, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat berdampak positif pada prestasi akademik dan perkembangan karakter peserta didik.

Meskipun integrasi nilai-nilai Islam dalam KOSP memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman guru tentang integrasi kurikulum, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang memadai.

Dengan memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka, sekolah memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam

kurikulum operasional mereka. Melalui pendekatan yang terencana dan kolaboratif, integrasi ini dapat memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Kesimpulan

Struktur Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional di Indonesia memberikan fleksibilitas pengembangan kurikulum, namun secara sistemik masih memisahkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari mata pelajaran umum. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Islam, khususnya akhlak dan spiritualitas, belum menjadi standar terintegrasi dalam pembentukan kompetensi lulusan. Pendidikan Islam memandang bahwa pembentukan karakter dan akhlak mulia merupakan inti dari pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kognitif. Kurikulum nasional saat ini belum secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan Islam dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai fondasi pendidikan yang holistik. Namun, adanya ruang fleksibilitas melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) membuka peluang integrasi nilai-nilai Islam secara kontekstual sesuai karakteristik sekolah dan peserta didik. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan kurikulum dan peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam sebagai landasan pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan nasional dapat membentuk generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan beriman, sesuai tujuan pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. International Institute of Islamic



- Thought and Civilization, International Islamic University.
- Atma, A. (2019). Pengembangan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter. *BADA'A: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 31–43.
- Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, & Kemenristek. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*.
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. In *Jurnal Riset Agama* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- Hadi, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Islam: Integrasi Nilai - Nilai Keislaman Dan Kemandirian Belajar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4).
- Kemendikbudristek. (2022). *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan*.
- Mardatillah, O., Wardah, Q., & Gusmaneli. (2025). Implikasi Dasar dan Landasan Pendidikan Islam terhadap Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 02(01), 144–149.
- Muh. Subhan Ashari. (2020). Teologi Islam Persepektif Harun Nasution. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 73–96. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v12i1.82>
- Nazar, E. R., Nasir, Bagea, I., & Abuakbar. (2024). Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah. *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 18–31.
- Puspitasari, E., & Yuliana, A. T. R. D. (2022). Syed Muhammad Naquib al-Attas' Concept of Islamizing Science and its Relevance to Islamic Education. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)*, 10(2), 91–108. <https://doi.org/10.26555/almisbah.v10i2.6484>
- Ramadhan, W., & Santosa, S. (2023). Analisis Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pembelajaran Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial (IPAS) Pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Journal of Primary Education*, 1(1), 81–92.
- Sufiyah, S., & Cahyadi, A. (2024). INTEGRASI KURIKULUM MERDEKA PADA PEMBELAJARAN PAI DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL. *Berajah Journal*, 04(03). <https://doi.org/10.47353/bj.v4i3.350>
- Sulaiman, H., & Musthofa, F. A. (2023). Nilai-Nilai Edukatif Menurut Al-Qur'an Surat Al-'Alaq 1-5 (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Masagi*, 2(1), 317–324. <https://doi.org/10.37968/masagi.v2i1.578>
- Wulandari, H., & Ningsih, S. A. (2023). Penguatan Pendidikan Karakter Sejak Dini Melawan Aksi Bullying Era Revolusi 5.0. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.